

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum

Buku, Jurnal, Internet

Alia Yassinta Echa Putri, Penegakan hukum di Indonesia: pengertian, fungsi, dan contoh lembaganya dalam <https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-Indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>

Annisa, 2023, *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya* dalam <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Badan Pusat Statistik Indonesia tentang jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019-2021

Berkat, Problematika Perbedaan pendapat antara bawaslu dan sentra gakkumdu terhadap penegakan hukum pelanggaran politik uang studi kasus pelanggaran politik uang pada pilkada serentak kabupaten Bantul tahun 2020 , dalam https://e-journal.uajy.ac.id/27198/3/185202912_bab%202 di halaman 32

Herawati, Anita. (2020). *Edukasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. Penerbit NEM

Kamus besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/lalulintas>, diakses pada 25 Juni 2024

Laura Tysara, 15 pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan Sanksinya, dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/4987355/15> diakses pada 15 Juni 2024

- Maliarsa, K., & Surata, I. K. (n.d.). *dasar dasar hukum pidana di indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H.,M.H.*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Ctk. Pratama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 8
- Taufiq Sidik Prakoso, *Baru 2 Hari Operasi patuh candi di klaten, 353 pelanggar lalu lintas ditilang*, dalam <https://soloraya.solopos.com/baru-2-hari-operasi-patuh-candi-di-klaten-353-pelanggar-lalu-lintas-ditilang-1682548>
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 183
- Zikri, Muhammad. (2022). “PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 391–406